

BAB I

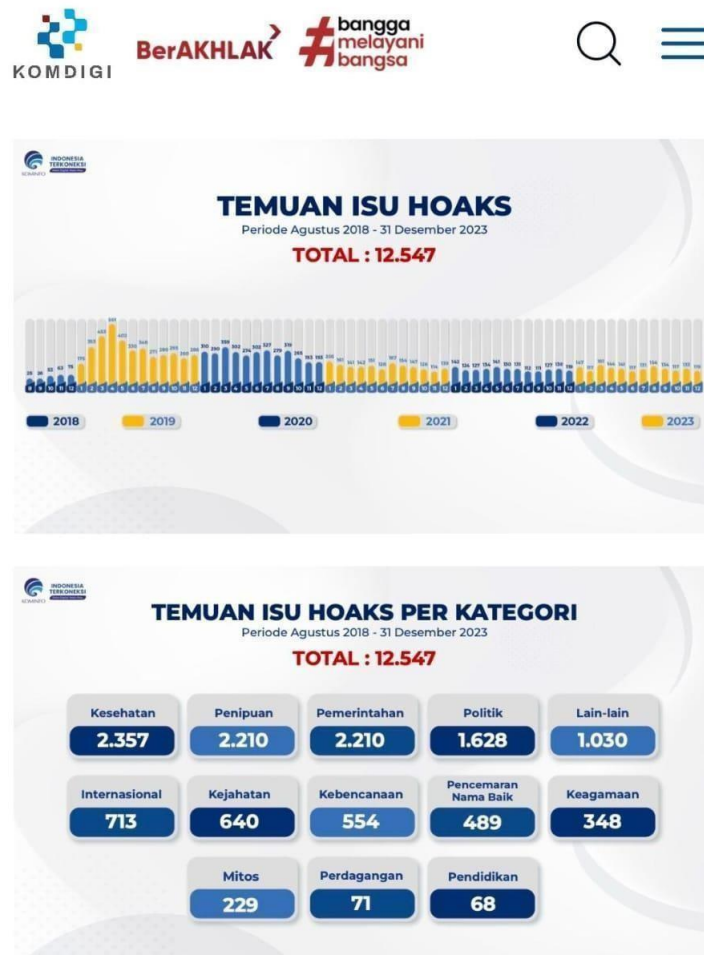
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara aktor politik berinteraksi dengan masyarakat. Media sosial kini menjadi sarana utama dalam kampanye politik, mobilisasi massa, dan pembentukan opini publik (Ahmad, 2022). Meskipun menawarkan peluang untuk komunikasi yang lebih personal dan interaktif, era digital juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi yang mengancam integritas demokrasi. Komunikasi politik kini melibatkan berbagai pihak politisi, partai, media, masyarakat, hingga algoritma platform digital yang menciptakan dinamika baru dalam penyebaran informasi. Namun, kecepatan arus informasi sering kali tidak sejalan dengan akurasi, sehingga memicu maraknya penyebaran berita palsu atau disinformasi (Suardi, 2024).

Disinformasi merupakan penyebaran informasi yang salah secara sengaja untuk memengaruhi opini publik, menimbulkan kebingungan, atau merusak reputasi individu maupun institusi (Aminudin, 2022). Berbeda dengan *miss* informasi yang muncul karena ketidaktahuan, disinformasi dirancang dengan tujuan tertentu, sering kali bermuatan politik, ideologis, atau komersial. Algoritma media sosial yang memprioritaskan keterlibatan pengguna mempercepat penyebaran konten sensasional, sementara rendahnya literasi digital masyarakat memperburuk situasi tersebut. Dampaknya tidak hanya pada persepsi individu, tetapi juga memicu polarisasi sosial, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, dan mengancam stabilitas nasional (Rambe, A., Rayyan, R., Ginting, M., Azzahra, Z., & Siregar, 2025). Disinformasi bahkan dapat menjadi ancaman terhadap keamanan negara (Collins et al., 2021). Fenomena ini tidak hanya mengaburkan fakta, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik dan media. Penelitian Dharmajaya et al. (2025), menjelaskan bahwa *“fake news is often used as a tool to manipulate public perception, influence election results, or discredit political opponents.”* Dalam banyak kasus, penyebaran disinformasi

semakin cepat karena didorong oleh algoritma yang menonjolkan popularitas konten, bukan kebenarannya.



Gambar 1.1 Temuan Isu Hoax

Sumber: Komdigi

Fenomena disinformasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan pada periode 2024–2025. Menurut Kominfo, sepanjang lima tahun terakhir telah ditemukan 12.547 konten hoaks, dengan 1.628 di antaranya berkaitan langsung dengan isu politik (Kominfo, 2024). Selama masa kampanye Pemilu 2024, pemerintah juga menurunkan 165 konten hoaks politik (Antara News, 2024), dan secara keseluruhan 1.971 berita hoaks pemilu telah di *take down* selama periode tersebut (Kompas, 2024). Data ini menunjukkan bahwa penyebaran disinformasi tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga semakin sistematis dan diarahkan pada isu-isu politik strategis yang memengaruhi opini publik.

Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI



komdigi.go.id

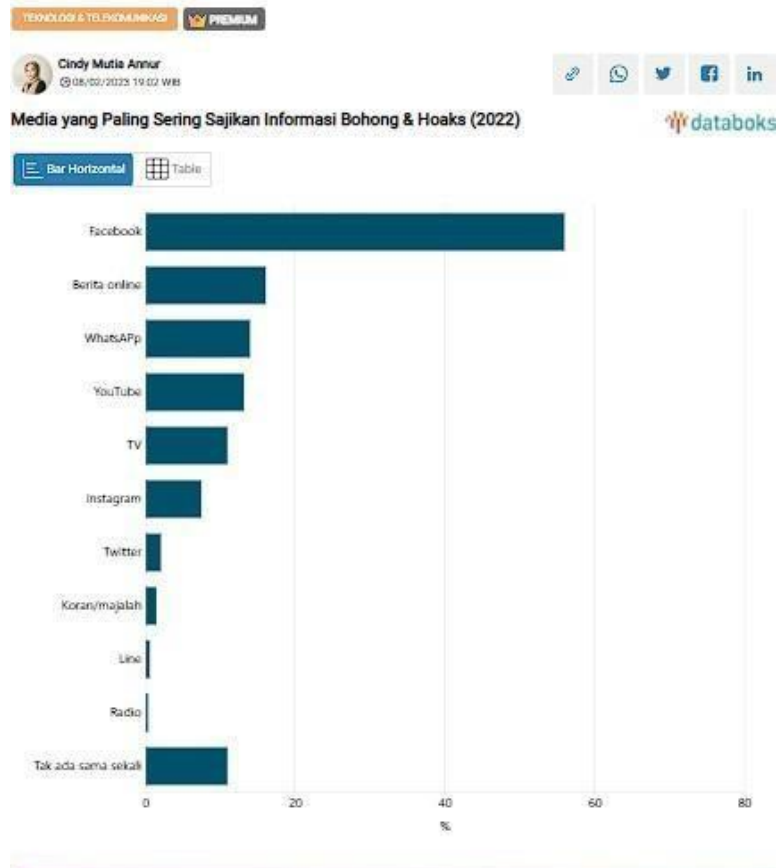
Gambar 1.2 Peningkatan Konten Deepfake

Sumber: Komdigi

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan turut memperburuk kondisi tersebut. Komdigi mencatat adanya kenaikan 550% konten *deepfake* dalam lima tahun terakhir (Komdigi, 2025), sementara laporan lain menunjukkan meningkatnya penggunaan *voice-cloning* dan situs palsu sebagai sarana penipuan dan manipulasi politik (Times Indonesia, 2025). Keberadaan *deepfake* menjadikan disinformasi lebih sulit dikenali masyarakat dan membuka ruang penyalahgunaan untuk agenda politik tertentu.

Dampak politik dari disinformasi juga tampak dalam polarisasi pasca-Pemilu 2024, yang menunjukkan terjadinya segregasi opini politik di masyarakat urban meski konflik terbuka dapat dikendalikan (Jurnal Civic Hukum, 2024). Polarisasi ini memperkuat delegitimasi institusi negara dan menghambat deliberasi publik, khususnya ketika wacana politik dibentuk oleh informasi yang bias atau manipulatif.

Selain Facebook, Masyarakat Indonesia Sering Temukan Hoaks di Media Ini



Gambar 1.3 Media Sosial Penyebaran Hoaks

Sumber: Katadata

Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial yang sangat besar dengan tingkat penyebaran berita bohong juga tergolong tinggi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 565.449 konten hoaks yang diblokir di berbagai platform digital, menunjukkan betapa masifnya arus disinformasi di dunia maya. Tren ini terus berlanjut, di mana pada triwulan pertama tahun 2023 Kominfo mengidentifikasi 425 hoaks yang tersebar di situs web dan platform digital. Berdasarkan laporan Kominfo dan Katadata *Insight Center* (2023), media sosial menjadi saluran utama penyebaran hoaks, dengan Facebook sebagai platform terbanyak (55,9%), diikuti oleh berita *online* (16%), *WhatsApp* (13,9%), dan *YouTube* (13,1%) (Rifa'i, 2021).

Salah satu figur yang menaruh perhatian besar terhadap isu disinformasi adalah Ferry Irwandi, melalui inisiatif yang dikenal dengan Malaka Project.

Gerakan ini berfokus pada edukasi publik mengenai literasi digital dan upaya menangkal narasi politik yang bersifat manipulatif di ruang maya. Sebagai seorang komunikator politik, Ferry Irwandi memanfaatkan pendekatan strategis berbasis media digital dengan menggabungkan unsur edukasi, dialog interaktif, dan gaya komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan transformasi baru dalam strategi komunikasi politik, di mana *content creator* tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen literasi digital dan penjaga integritas demokrasi (Puteri et al., 2025).

Dalam perspektif ilmu politik, keberadaan *influencer* seperti Ferry Irwandi perlu diposisikan sebagai aktor politik non-elite dalam *hybrid media system*, yaitu ekosistem politik media yang menggabungkan interaksi antara media digital, media arus utama, jaringan informal, dan institusi negara. Dalam sistem ini, aktor non-elite memperoleh pengaruh bukan melalui jabatan formal, melainkan melalui kemampuan membentuk opini publik dan memengaruhi agenda politik melalui produksi narasi (Nofiard, 2022). Disinformasi yang menjadi fokus Ferry bukan hanya masalah komunikasi, tetapi merupakan ancaman politik karena berkaitan dengan perebutan kontrol informasi, delegitimasi institusi, dan dinamika kekuasaan. Dayuni (2025) menunjukkan bahwa disinformasi bekerja melalui logika emosional yang memperdalam polarisasi dan dapat dimanfaatkan untuk operasi pengaruh oleh aktor-aktor elite. Dalam konteks ini, kontestasi wacana digital tidak dapat dilepaskan dari strategi politik elite yang sering menggunakan propaganda atau *buzzer* untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan (Arianto, 2022). Oleh karena itu, peran Ferry Irwandi sebagai *influencer* politik mencerminkan fungsi aktor non-elite yang memasuki arena kontestasi kekuasaan melalui media digital menantang dominasi narasi elite, merespons delegitimasi institusi, sekaligus membentuk partisipasi politik warga di tengah ancaman disinformasi terhadap demokrasi.

Dalam konteks kebijakan publik, peran Ferry Irwandi dan Malaka Project berkaitan erat dengan agenda negara dalam memperkuat tata kelola informasi (*information governance*), reformasi kebijakan media digital, serta peningkatan ketahanan demokrasi. Pemerintah Indonesia sendiri tengah menghadapi tantangan

serius terkait disinformasi yang mengancam legitimasi institusi, stabilitas politik, dan kepercayaan *public* sebagaimana digarisbawahi dalam studi Dharmajaya et al. (2025) yang menunjukkan bahwa arus informasi digital sering dimanfaatkan dalam kontestasi politik dan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Upaya negara meningkatkan kredibilitas informasi, seperti yang dijelaskan Suardi, (2024), menuntut adanya kolaborasi aktor non-negara dalam memperkuat ekosistem media yang akuntabel. Dalam kerangka tersebut, *influencer* seperti Ferry berperan sebagai bagian dari aktor kebijakan publik non-pemerintah yang dapat mendukung agenda anti-disinformasi melalui edukasi politik, klarifikasi narasi, dan pembentukan literasi digital masyarakat. Peran ini sejalan dengan kebutuhan reformasi kebijakan media digital sebagaimana digambarkan oleh Nofiard (2022), bahwa keberhasilan *governance* informasi tidak hanya ditentukan oleh intervensi negara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat sipil dan aktor politik non-elite dalam menjaga ruang publik yang sehat. Dengan demikian, aktivitas Malaka Project berkontribusi pada ekosistem kebijakan yang lebih luas, yakni memperkuat ketahanan demokrasi melalui kolaborasi antara warga, *influencer* politik, dan institusi negara dalam menghadapi ancaman disinformasi.

Meskipun Ferry Irwandi mendapat dukungan luas sebagai penggerak literasi digital, posisinya dalam ruang publik juga menghadapi kritik yang signifikan. Pada September 2025, TNI melaporkan Ferry ke Polda Metro Jaya setelah satuan siber menemukan dugaan konten yang dianggap menyesatkan dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional (*IbeNews*, 2025). Namun, langkah ini menuai perdebatan karena berdasarkan Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, institusi negara seperti TNI tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik; laporan semacam itu harus diajukan oleh individu, bukan lembaga. Kritik ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPR yang menilai bahwa dasar hukum laporan tersebut “tidak tepat secara konstitusional” (*DetikNews*, 2025a). Pandangan yang sama ditegaskan oleh Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa TNI “tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan laporan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE” (*DetikNews*, 2025b).

Di sisi lain, sejumlah analis menilai bahwa tindakan TNI merupakan bentuk respons institusi terhadap narasi Ferry yang kerap menyoroti isu sensitif terkait

militer, dimana konten-konten tersebut dipersepsikan memojokkan institusi keamanan (*IbeNews*, 2025). Polemik tersebut akhirnya mereda setelah Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menghubungi Ferry dan mengumumkan bahwa kedua pihak mencapai kesepakatan serta sepakat menempuh jalur damai (*DetikNews*, 2025c). Dinamika ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Ferry tidak hanya berada pada konteks edukasi digital, tetapi juga turut bersinggungan dengan konflik institusional, persepsi publik, serta sensitivitas politik yang kompleks. Oleh karena itu, analisis strateginya mesti mempertimbangkan tantangan legal-politis, potensi resistensi institusional, dan dinamika opini publik yang menyertai setiap narasi yang ia bangun.

Selain sebagai komunikator politik, Ferry Irwandi juga dikenal sebagai sosok yang konsisten membangun ekosistem digital beretika dan partisipatif melalui pendekatan kreatif. Ia memanfaatkan kekuatan narasi, visual, dan *storytelling* untuk menyampaikan isu-isu politik dengan cara yang ringan namun berdampak. Sehingga pesan literasi digital dapat diterima oleh kalangan muda. Keaktifannya di berbagai platform seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok* menunjukkan kemampuannya membaca tren komunikasi digital dan menyesuaikannya dengan kebutuhan audiens masa kini (Lestari et al., 2025). Ferry juga membuka ruang dialog publik dengan mengundang tokoh lintas bidang untuk membentuk diskursus politik yang terbuka. Ia sering menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, media, dan pemerintah dalam menghadapi ancaman disinformasi (Abimanyu, 2024).

Strategi komunikasi menjadi landasan penting dalam menjelaskan cara Ferry Irwandi merancang dan mengelola pesan agar efektif diterima oleh publik. Strategi komunikasi merupakan proses perencanaan (*planning*) dan pengelolaan (*management*) pesan agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif. Dalam penerapannya, strategi tidak hanya berfungsi sebagai panduan arah komunikasi, tetapi juga harus mampu menunjukkan langkah-langkah operasional dalam pelaksanaannya. Penyusunan strategi komunikasi juga merupakan sebuah seni yang membutuhkan kreativitas, pemahaman konteks sosial, serta dukungan teori yang relevan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh khalayak (Asri, 2022).

Dalam komunikasi politik digital seperti yang dilakukan Ferry Irwandi melalui Malaka Project, strategi komunikasi menjadi sarana penting untuk mengelola opini publik, memilih saluran yang tepat, serta membangun interaksi yang partisipatif. Sejalan dengan pandangan Hajar & Syaesti (2023) strategi komunikasi juga mencakup upaya memahami karakter audiens, menentukan media yang efektif, dan membentuk opini publik yang mendukung perilaku atau sikap tertentu. Strategi komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan partisipatif, terutama dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital. Prinsip-prinsip tersebut tampak dalam penerapan strategi yang dijalankan oleh Ferry Irwandi melalui Malaka Project.

Malaka Project juga sebagai salah satu praktik politik digital yang berkembang di Indonesia. Proyek ini tidak hanya hadir sebagai strategi komunikasi, tetapi ruang interaksi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam percakapan politik di media digital. Melalui berbagai kegiatan seperti literasi digital, diskusi publik, dan produksi konten edukatif, Malaka Project bermanfaat dalam melatih masyarakat menerima informasi, menyaring, menilai, serta membentuk opini politik (Syaharani et al., 2024). Kehadiran proyek ini menunjukkan bagaimana arena digital dapat menjadi tempat lahirnya relasi kekuasaan baru dengan partisipasi warga yang aktif menyuarakan pandangan. Ruang partisipasi publik di ranah digital juga semakin terbuka sehingga mendorong lahirnya kesadaran politik yang lebih kritis untuk memperkuat demokrasi (Anam, 2024). Hal ini menjadi penting karena arus disinformasi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Malaka Project juga dapat dilihat sebagai upaya memperkuat ketahanan demokrasi Indonesia melalui partisipasi warga yang sadar, kritis, dan berdaya di era digital.

Penelitian serupa telah mengkaji berbagai strategi komunikasi dalam menangkal disinformasi dan hoaks di era digital. Penelitian Rifa'i, (2021) mengkaji pentingnya komunikasi institusional yang transparan dan berbasis data dalam penyelenggaraan ibadah haji. Studi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menyediakan informasi resmi dan faktual melalui kanal digital mampu menekan persebaran hoaks. Transparansi informasi, kecepatan klarifikasi, serta konsistensi pesan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik

terhadap institusi keagamaan. Strategi komunikasi publik berbasis data bukan hanya instrumen manajerial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral negara dalam menjaga integritas informasi.

Selanjutnya, penelitian Puteri et al. (2025) memberikan perspektif yang berbeda dengan mengkaji peran individu dan *content creator* independen, yaitu Ferry Irwandi melalui Malaka Project dalam menghadapi disinformasi. Penelitian ini mengungkap bahwa Ferry Irwandi berperan sebagai agen bela negara digital yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap narasi manipulatif melalui konten edukatif dan empatik. Strategi komunikasi yang ia gunakan memadukan pendekatan persuasif, dialogis, serta penggunaan bahasa yang dekat dengan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *influencer* politik dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkuat literasi digital publik tanpa harus bergantung pada struktur institusional formal. Melalui gaya komunikasi yang santai dan berbasis empati, Ferry Irwandi berhasil membangun hubungan timbal balik dengan audiens digital yang menjadikan pesan literasi politik lebih mudah diterima. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Aliah et al. (2025) mengkaji persoalan dari sudut pandang etika jurnalisme dan tanggung jawab media massa di tengah derasnya arus informasi digital. Penelitian ini mengkaji bahwa kecepatan distribusi berita sering mengorbankan akurasi dan verifikasi sehingga menimbulkan degradasi terhadap kepercayaan publik. Pada situasi di mana disinformasi mudah menyebar, jurnalisme etis memiliki peran strategis sebagai penyeimbang narasi publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media harus mampu menyesuaikan diri dengan karakter algoritmik platform digital tanpa kehilangan nilai-nilai objektivitas. Jurnalisme etis dan literasi digital masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan menyebarnya disinformasi dan menjaga kualitas informasi.

Namun, penelitian terdahulu terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu minimnya kajian yang mengintegrasikan strategi komunikasi politik digital oleh *content creator* independen dengan evaluasi efektivitas pesan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Ferry Irwandi menarik untuk diteliti karena menunjukkan bentuk nyata dari bela negara digital, yaitu partisipasi aktif warga dalam menjaga kedaulatan informasi dan memperkuat ketahanan ideologis bangsa melalui media

sosial. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi politik dapat digunakan sebagai instrumen efektif dalam melawan disinformasi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat budaya politik yang sehat di era digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul "Strategi Komunikasi *Influencer* Politik Ferry Irwandi melalui Malaka Project dalam Melawan Disinformasi Politik Digital".

Istilah *melawan* dalam judul penelitian ini tidak dimaknai sebagai bentuk perlawanan konfrontatif atau oposisi politik terhadap aktor maupun institusi tertentu. Sebaliknya, *melawan* dipahami sebagai upaya komunikatif dan strategis untuk merespons serta menekan dampak disinformasi politik digital melalui penyediaan informasi yang akurat, edukatif, dan kontekstual. Melalui klarifikasi, penjelasan berbasis data, dan literasi digital, aktivitas komunikasi yang dilakukan bertujuan membantu masyarakat memahami isu politik secara lebih rasional dan kritis. Dengan demikian, penggunaan istilah *melawan* dalam penelitian ini menekankan pada upaya memperbaiki kualitas informasi publik dan menjaga ruang diskursus politik tetap sehat, bukan pada tindakan yang bersifat konflik atau konfrontasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan Ferry Irwandi melalui Malaka Project dalam melawan disinformasi politik digital?
2. Bagaimana bentuk praktik wacana dalam konten Malaka Project yang merepresentasikan upaya *counter-disinformation* di ruang media digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi komunikasi Ferry Irwandi dalam Malaka Project sebagai upaya melawan disinformasi politik digital.

2. Mengungkap praktik wacana kritis dalam konten Malaka Project sebagai representasi strategi *counter-disinformation*.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademik maupun praktik, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

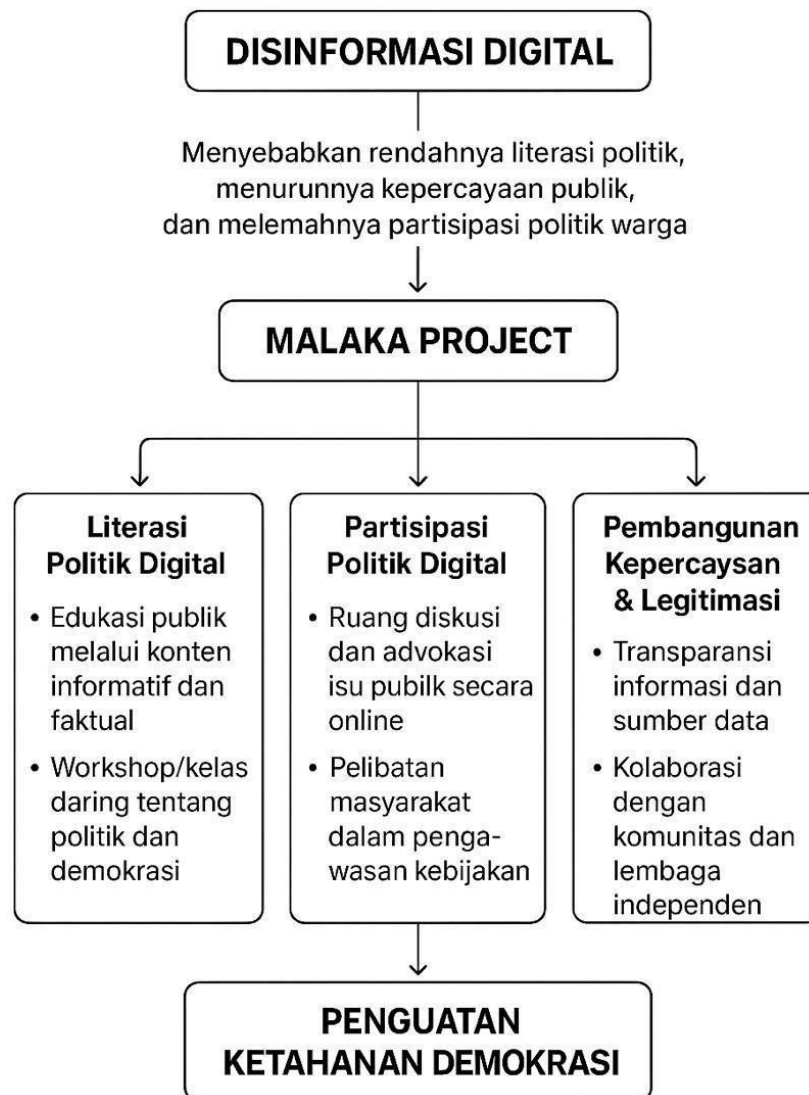
1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik digital, khususnya mengenai strategi komunikasi *influencer* dalam membangun narasi tandingan terhadap disinformasi di media sosial.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Malaka Project, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif.
- b. Bagi pemerintah dan lembaga literasi digital, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan program edukasi publik terkait resistensi terhadap disinformasi.
- c. Bagi masyarakat dan komunitas digital, penelitian ini meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi edukatif dan pentingnya literasi digital dalam menghadapi disinformasi politik digital.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1.4 Diagram Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini berangkat dari permasalahan utama yaitu disinformasi digital, sebuah fenomena yang semakin mengemuka di ruang publik Indonesia. Disinformasi yang tersebar melalui berbagai platform digital menyebabkan tiga dampak signifikan: rendahnya literasi politik, menurunnya kepercayaan publik, dan melemahnya partisipasi politik warga. Ketiga dampak tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kerentanan demokrasi, karena publik menjadi mudah dipengaruhi informasi palsu, skeptis terhadap institusi politik, dan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, disinformasi digital

dipahami bukan hanya sebagai gangguan informasi, tetapi sebagai ancaman struktural terhadap kualitas kehidupan demokratis.

Untuk merespons persoalan tersebut, dirumuskan sebuah inisiatif bernama Malaka Project. Proyek ini ditempatkan sebagai intervensi strategis yang berfungsi menjawab dampak negatif dari disinformasi digital. Malaka Project dirancang dengan pendekatan multidimensi yang mencakup literasi politik digital, partisipasi politik digital, serta pembangunan kepercayaan dan legitimasi. Ketiga dimensi utama ini dipilih karena saling menguatkan: peningkatan literasi akan membantu publik menyaring informasi, peningkatan partisipasi akan memperkuat keterlibatan warga dalam isu publik, dan pembangunan kepercayaan akan memulihkan hubungan antara masyarakat dengan institusi demokrasi.

Komponen pertama, Literasi Politik Digital, berfokus pada upaya memberikan pemahaman yang benar, kritis, dan faktual kepada publik mengenai isu-isu politik dan demokrasi. Melalui konten edukatif dan program *workshop* atau kelas daring, masyarakat dilatih untuk mengenali disinformasi, memahami mekanisme politik, serta meningkatkan kapasitas berpikir kritis mereka. Literasi politik menjadi fondasi karena warga yang melek informasi akan lebih resisten terhadap manipulasi digital dan propaganda.

Komponen kedua, Partisipasi Politik Digital, menyediakan ruang bagi warga untuk berdiskusi, berpendapat, serta berpartisipasi dalam advokasi isu publik melalui media *online*. Selain itu, Malaka Project juga mendorong pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan, sehingga keterlibatan warga tidak hanya bersifat pasif tetapi juga aktif dan konstruktif. Dengan meningkatnya partisipasi, warga memiliki posisi lebih kuat dalam memengaruhi proses politik serta menjaga transparansi pemerintahan.

Komponen ketiga, Pembangunan Kepercayaan dan Legitimasi, berfokus pada transparansi informasi serta kolaborasi antara proyek dengan komunitas dan lembaga independen. Melalui keterbukaan data dan komunikasi yang akuntabel, publik dapat memulihkan rasa percaya mereka terhadap berbagai institusi demokrasi. Kerja sama dengan aktor independen memperkuat legitimasi inisiatif serta memastikan bahwa prosesnya bebas dari kepentingan politik tertentu.

Ketiga komponen tersebut, ketika berjalan secara terpadu, berkontribusi langsung pada tujuan akhir, yaitu Penguatan Ketahanan Demokrasi. Demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memverifikasi informasi; kemampuan mereka untuk terlibat; serta tingkat kepercayaan mereka pada sistem politik. Malaka Project hadir sebagai intervensi yang berupaya menciptakan ekosistem digital yang sehat, kritis, partisipatif, dan transparan, sehingga demokrasi dapat tumbuh lebih resilien menghadapi ancaman disinformasi.

